

ABSTRAK

Pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak bagi pembangunan dengan sistem *self assessment*, diperlukan sebuah organ atau badan pemerintah yang mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak melalui penyuluhan secara intensif dan pelayanan secara prima. Selain itu, organ atau badan pemerintah tersebut juga dapat melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya.

Penegakan hukum dibidang pajak dilakukan dengan menerbitkan suatu surat ketetapan. Pengambilan keputusan atau ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak harus dilakukan melalui kegiatan penelitian dan/atau pemeriksaan yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Produk hukum yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut adalah Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), yang bersifat konkret-individual.

Dalam tesis ini Penulis memfokuskan pada 2 (dua) hal, (1) keabsahan penerbitan surat ketetapan pajak yang sesuai ketentuan peraturan perpajakan; (2) perlindungan hukum bagi Wajib Pajak terhadap surat ketetapan pajak penghasilan yang penerbitannya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu prosedur yang sangat penting dalam penerbitan surat ketetapan pajak yaitu pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, apabila hal tersebut tidak dilakukan maka penerbitan suatu surat ketetapan pajak menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Dalam upaya menegakkan hak Wajib Pajak maka diperlukan upaya hukum yang bersifat preventif di dalam institusi perpajakan dan represif melalui badan peradilan. Perlindungan hukum merupakan hal yang mutlak diperlukan Wajib Pajak karena karakteristik dari ketetapan pemerintah adalah bersifat sepihak

Kata Kunci : Keabsahan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Upaya Hukum Bagi Wajib Pajak.

ABSTRACT

Taxes have a very dominant role in supporting the way the wheels of government. To fulfill the expectation of increasing the role of tax for development with self assessment system, it is needed an organ or government agency that support the smooth fulfillment of tax obligation by Taxpayer through intensive extension and excellent service. In addition, these organs or government bodies can also enforce the law (law enforcement) to the process and implementation of the system remains in the rules.

Law enforcement in the field of taxes is done by issuing a decree. Decision making or tax assessment by the Director General of Taxes shall be conducted through valid research and / or examination activities in accordance with applicable regulations. The legal products resulting from the research and / or inspection activities are Tax Collection Letters and / or tax assessment letters (Taxpayer Underpayment Letter, Additional Tax Underpayment Certificate, Tax Assessment Letters Nil, or Overpay Tax Assessment Letter), which is concrete-individual.

In this thesis the author focuses on 2 (two) things, (1) the validity of the issuance of tax assessment letters in accordance with the provisions of the tax laws; (2) legal protection for the Taxpayer against income tax assessment letters whose issuance is not in accordance with the provisions of the tax laws.

The research results showed that there is a procedure that is very important in the issuance of tax assessment letters namely notification of the results of the examination and final discussion of the results of the examination, if it is not done then the issuance of a tax assessment letter becomes invalid and can be canceled. In an effort to enforce taxpayer rights then there is a need for a preventive legal effort within the institution of taxation and repression through the judiciary. Legal protection is absolutely necessary for the Taxpayer because the characteristics of the government's provisions are unilateral

Keywords: Validity of Issuance of Tax Assessment Letter, Legal Effort for Taxpayer.